



Article Informations
Corresponding Email:
mdepanshkn@gmail.com

Received: 04/02/2025; Accepted:
15/02/2025; Published: 30/06/2025

PERAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DI KAWASAN GOLDEN TRIANGLE (LAOS, MYANMAR, DAN THAILAND)

Musda Depansha Kusnaedi Nugraha

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi dapat merubah situasi dan kondisi dinamika hubungan internasional, tidak hanya dalam konteks konflik antar negara saja tetapi juga dalam kejahatan transnasional yang semakin marak, salah satunya seperti peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos. Sehingga, dengan adanya permasalahan tersebut dibentuklah *ASEAN Senior Officials On Drugs Matters* atau yang biasa disebut dengan ASOD, yang memiliki maksud dan tujuan dapat menanggulangi permasalahan peredaran narkoba di kawasan Asia dan seluruh dunia. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan menguraikan bagaimana peran ASOD dalam memberantas peredaran narkoba itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan neo-liberalisme, dengan konsep keamanan manusia, konsep kejahatan transnasional, dan juga konsep peran. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan bahan acuan melalui studi kepustakaan mengenai peran ASOD dalam menanggulangi peredaran narkoba di *Golden Triangle*. Penelitian mengenai peran ASOD dalam penanggulangan peredaran narkoba ini dapat dikatakan tidak terlalu efektif, meskipun ASOD memiliki peran sebagai sarana kerjasama, wadah, mekanisme administrasi, dan juga saluran komunikasi yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi, hal tersebut masih memiliki berbagai hambatan yang mengharuskan ASOD lebih maksimal lagi dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Kata Kunci : *Drug Trafficking, ASOD, Golden Triangle.*

Abstract

Along with the development of the era of globalization, it can change the situation and conditions of the dynamics of international relations, not only in the context of conflicts between countries but also in transnational crimes which are increasingly widespread, one of which is drug trafficking in the Golden Triangle area, namely Thailand, Myanmar and Laos. So, with these problems, the ASEAN Senior Officials On Drugs Matters or what is usually called ASOD was formed, which has the aim and objective of tackling the problem of drug trafficking in the Asian region and throughout the world. Therefore, researchers will focus this research by explaining the role of ASOD in eradicating drug trafficking itself.

This research uses a neo-liberalist approach, with the concept of human security, the concept of transnational crime, and also the concept of role. In this research, the researcher also used qualitative research methods, with reference material through literature studies regarding the role of ASOD in tackling drug trafficking in the Golden Triangle. Research regarding the role of ASOD in tackling drug trafficking can be said to be not very effective, even though ASOD has a role as a means of cooperation, forum, administrative mechanism, and also a communication channel that is carried out in accordance with existing regulations. However, this still has various obstacles that require ASOD to be more optimal in solving problems that occur.

Keyword : Drug Trafficking, ASOD, and Golden Triangle.

PENDAHULUAN

Golden Triangle merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari tiga negara di kawasan Asia Tenggara yang mana kawasan inilah yang menjadi rumah bagi narkotika berjenis, *heroin* dan *amphetamine* yang diproduksi serta disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.. *Drug trafficking* adalah bagian dari ancaman kedaulatan negara dan masyarakat internasional yang menjadi sorotan. Oleh karena itu ASEAN memiliki tekad dalam mengatasi permasalahan narkoba. Sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara, ASEAN membentuk badan komite yang bertanggung jawab langsung kepada ASEAN untuk menanggulangi peredaran narkoba, yaitu *ASEAN Senior Official on Drugs Matters* (ASOD). ASOD dibentuk bersama untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan peredaran obat-obatan terlarang di

kawasannya yang saat itu terdiri dari enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam.¹

Dampak pada keamanan internasional terjadi sangat pesat dikarenakan perkembangan waktu dan teknologi yang begitu pesat, world politics, dan pada hak asasi manusia, fenomena ini bersifat internasional atau yang dikenal dengan *Transnational Organized Crime* (TOC). Selain kedaulatan sebuah negara yang terancam, masyarakat internasional juga terkena dampak dengan maraknya kejahatan lintas negara ini. Salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan lintas negara yang tinggi adalah Asia Tenggara.

Karena maraknya peredaran narkoba di setiap negara di Asia Tenggara, berdampak pada hilangnya rasa aman para masyarakat dalam melangsungkan hidupnya. Media marak melaporkan hasil penyitaan terkemuka di beberapa negara ASEAN pada tahun 2018, seperti: Metamfetamin senilai 43,66 miliar rupiah (3 juta dolar A.S.) di Indonesia, yang diselundupkan melalui laut dari Singapura pada bulan Januari; heroin senilai 36,36 miliar rupiah (2,5 juta dolar A.S.) di Vietnam pada bulan Februari; ribuan tablet metamfetamin dan beberapa kilo ganja disita oleh polisi bandara di Singapura pada bulan Juli; dan metamfetamin senilai 7,27 miliar rupiah (500.000 dolar A.S.) menuju Korea Selatan yang disita di bandara Malaysia pada bulan Agustus.² Sebagai kawasan yang terletak sangat strategis dan didalamnya terdapat banyak negara berkembang, Asia Tenggara sangat rentan terhadap peredaran narkoba, ditambah dengan adanya kawasan Segitiga Emas yang merupakan kawasan dengan produsen obat-obatan yang tinggi dalam skala global membuat Asia Tenggara perlu memusatkan perhatiannya terhadap kejahatan lintas negara ini.

¹ Nurul Isnaini, "*Kebijakan ASEAN dalam penanganan Drugs Trafficking di Kawasan segitiga emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016*". Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hal. 2.

² Tom Abke, "*Negara-negara ASEAN Bekerja Sama Untuk Membasmi Peredaran Narkoba*". Indo-Pacific Defense Forum. 10 Januari 2019. <https://ipdefenseforum.com/id/2019/01/negara-negara-asean-bekerja-sama-untuk-membasmi-peredaran-narkoba/> . (diakses pada 25 April 2022).

Dalam konvensi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara di cantumkan pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEANPACTC) tahun 2002 yang menyebutkan delapan jenis *transnational crime* dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime*, dan *cyber crime*.³ Isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat internasional kini salah satunya ialah *drug trafficking* atau perdagangan narkoba. *Drug Trafficking* kini terjadi hampir pada setiap negara yang ada di dunia. Fenomena ini menjadi hangat diperbincangkan oleh masyarakat internasional salah satunya para pemangku kebijakan disetiap negara, karena fenomena ini sangat membahayakan kehidupan umat manusia. Fenomena terkait penyalahgunaan narkoba menjadi marak dan menjadi ancaman yang sangat menarik perhatian global terutama Asia Tenggara.⁴

Drug trafficking adalah bagian dari ancaman kedaulatan negara dan masyarakat internasional yang menjadi sorotan. Oleh karena itu ASEAN memiliki tekad dalam mengatasi permasalahan narkoba. Sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara, ASEAN membentuk badan komite yang bertanggung jawab langsung kepada ASEAN untuk menanggulangi peredaran narkotika, yaitu *ASEAN Senior Official on Drugs Matters* (ASOD). ASOD dibentuk bersama untuk mencegah dan menindaklanjuti kejahatan peredaran obat-obatan terlarang di kawasannya yang saat itu terdiri dari enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Brunei Darussalam.⁵

Negara yang termasuk kepada anggota ASEAN menyepakati adanya kerjasama dalam menangani permasalahan terkait peredaran narkoba sejak

³ Ayu Ma'rifah, dkk, *Op.Cit.*, Hal.998-999.

⁴ Devi, A, "*Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara*". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, (2016). Hal. 38.

⁵ Nurul Isnaini, "*Kebijakan ASEAN dalam penanganan Drugs Trafficking di Kawasan segitiga emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016*". Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hal. 2.

ditandatangani deklarasi ASEAN terkait memerangi narkoba (*ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*) pada sidang AMM (*ASEAN Ministerial Meeting*) di Manila. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya pada *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* yang dilakukan di Singapura, menghasilkan suatu upaya ASOD agar segera membentuk agenda pertemuan untuk membentuk rancangan khusus dalam meminimalisir penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara.⁶ Ancaman dari adanya penyalahgunaan narkoba ini disadari oleh para menteri luar negeri ASEAN yang mana hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN, Selanjutnya para anggota ASEAN melakukan desakan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya bersama setiap negara anggota yang terkena dampak secara langsung dari peredaran narkotika. Sehingga hal tersebut menjadi alasan para negara anggota mengapa *Drug-Free ASEAN 2020* menjadi *Drug-Free ASEAN 2015*.⁷

Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini ASOD sebagai pilar ASEAN dalam menanggulangi peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara. Secara umum mekanisme kerja ASOD adalah.⁸ Membuat agenda seperti apa yang akan dilaksanakan oleh para anggota. Kemudian, merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkotika, dan yang terakhir, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil working group yang diwadahi oleh ASOD sendiri.

PEMBAHASAN

Peran ASOD Sebagai Sarana Kerjasama

⁶ Juliando Rachman, P.A, "*Implikasi ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam menghadapi perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara*". Skripsi., Universitas Sriwijaya, 2021. Hal. 16.

⁷ Devi A. *Op.Cit.* Hal.48.

⁸ *Ibid.* Hal. 7.

Berlandaskan teori menurut A. LeRoy bahwasannya peran dan fungsi suatu organisasi internasional merupakan fasilitator untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara, yang dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa, dan juga menyediakan banyak saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. Kemudian, dalam peran ASOD yang pertama ini yaitu sebagai sarana kerjasama bagi permasalahan peredaran narkoba di kawasan Golden Triangle, dengan menjadi sarana kerjasama tersebut ASOD dapat dikatakan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena secara tidak langsung permasalahan tersebut dapat mengganggu kepentingan luar negeri negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Seperti yang diketahui sebelumnya, fakta bahwa beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos termasuk ke dalam negara yang memproduksi narkoba terbesar di dunia diantara Afghanistan, Pakistan, dan Iran yang disebut juga sebagai *Golden Crescent*. Thailand, Myanmar, dan Laos yang merupakan produsen narkoba di Asia Tenggara tersebut diperkirakan dapat menghasilkan sejumlah 60% dari produksi *opium* dan *heroin* yang tersebar di seluruh dunia.

Sehingga, dengan adanya produktivitas narkoba yang berjalan di negara-negara tersebut menghasilkan narkoba yang termasuk dalam kategori narkotika dan *potential addictive* yang terbuat dari jenis-jenis tumbuhan *opium poppy* dan *papaver somniferum* yang diolah menjadi *heroin*. Kawasan *Golden Triangle* ini pun memberikan sumbangan pada industri *heroin* di seluruh dunia yang bernilai US\$ 160 Milyar pertahun.⁹ Kemudian, Budidaya tanaman opium di Myanmar pada tahun 2013 naik 13% dari tahun sebelumnya menjadi 57.800 hektar (ha). Sementara pada tahun sebelumnya,

⁹ Fredy B. L. tobing. "Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara", dalam Jurnal Politik Internasional, Vol 5 No 1 November 2002 h. 83.

yakni antara tahun 2011 dan 2012, luas lahan tanaman opium mengalami peningkatan dari 40.000 ha menjadi 51.000 ha, atau sebesar 17%.¹⁰

Berdasarkan adanya uraian tersebut, peneliti dapat menjelaskan relevansi dari peran ASOD sebagai sarana kerjasama. Mengacu pada tugas-tugas ASOD yang terbentuk dalam visi misi ASEAN yang di mana ASOD diharapkan dapat memberikan pendapat serta strategi yang mampu menjadi saran untuk menangani permasalahan peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara, membentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kesepakatan dengan negara anggota ASEAN mengenai hal terkait, penetapan pedoman terhadap bahaya narkoba, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, serta melakukan evaluasi dalam penanganan masalah peredaran narkoba, dan meratifikasi perjanjian-perjanjian yang terbentuk dengan tujuan memberantas peredaran narkoba sesuai dengan ketentuan PBB.

Dengan adanya tugas tersebut, ASOD sendiri memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang mana salah satunya yaitu melibatkan pihak ketiga untuk memberantas peredaran narkoba, sehingga ketika ASOD bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia itu sendiri dapat membantu secara material. Karena pada dasarnya seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam pencegahan peredaran narkoba yang dilakukan oleh ASOD ini memiliki hambatan secara material. Sehingga diperlukannya kerjasama yang setidaknya dapat membantu keuangan yang menghambat penanggulangan masalah tersebut.

Tetapi, sebelum adanya kerjasama dengan pihak ketiga tersebut salah satu kerjasama yang utama terdapat pada negara-negara Asia Tenggara terlebih lagi yang menjadi anggota ASEAN itu sendiri, karena pada dasarnya jika terjadi permasalahan di suatu negara dapat terselesaikan ketika negara-

¹⁰ Devi Anggraini, "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara", dalam Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016.

negara yang bersangkutan dapat bekerjasama untuk mencari jalan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Oleh karena itu, peran ASOD sebagai sarana kerjasama sebetulnya memiliki relevansi yang cukup, karena seperti yang telah diketahui pada dasarnya pembentukan dari kerjasama ASEAN dalam ASOD ini merupakan perwujudan konkret ASEAN sebagai bentuk upaya menanggulangi kejahatan narkoba. Hal tersebut, dibuktikan oleh ASOD dalam membentuk kelompok kerja dengan tugasnya masing-masing untuk memberantas peredaran obat terlarang, dan membentuk *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Manufacturing Trafficking and Abuse* (2009-2015) sebagai hasil dari adanya kelompok kerja tersebut.

Akan tetapi, ASOD dapat menjadi sarana kerjasama tetapi tidak dengan implementasi kerjasama yang terbentuk tersebut yang dapat menurunkan peredaran narkoba di kawasan Asia, karena seperti yang telah diketahui bahwa peredaran narkoba dari tahun ke tahun semakin tinggi sampai dengan pada tahun 2013 yang berjumlah 12.000 (Dua Belas Ribu) kilogram yang tersebar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ASOD perlu membuat kebijakan yang konkret sehingga mampu untuk memberikan banyak peluang bagi penanggulangan peredaran narkoba tersebut. Serta, mampu untuk membentuk suatu kerjasama yang khusus dan berhasil dalam penanggulangan masalah tersebut.

Peran ASOD Sebagai Wadah

Berikutnya yang dijelaskan oleh LeRoy dalam hal ini ialah, suatu organisasi internasional dapat memiliki peran sebagai wadah. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu organisasi internasional dalam suatu kawasan mempunyai peran fungsi sebagai penampung aspirasi untuk anggota-anggotanya dalam menyampaikan pendapat dan saran ketika suatu permasalahan terjadi pada kawasan tersebut. Dengan adanya peran pada organisasi internasional ini bertujuan untuk mendapat perhatian publik yang secara tidak langsung mengasumsikan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi memerlukan bantuan dan kerjasama publik, karena permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup kawasan itu sendiri

melainkan melibatkan seluruh dunia, seperti permasalahan pada pemberantasan peredaran narkoba oleh ASOD di kawasan *Golden Triangle* ini yang menarik perhatian publik.

Jika dilihat dari bagaimana ASEAN menyikapi adanya peredaran narkoba dengan membentuk ASOD itu sendiri, pada faktanya ASOD memiliki peran aktif dalam mengatasi peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* tersebut dan memang itu sudah menjadi hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi ASOD sebagai wadah untuk memberantas peredaran narkoba. Pada dasarnya tugas utama ASOD yang harus dikerjakan ialah untuk mewedahi setiap persepsi dan asumsi anggotanya terkait masalah yang terjadi. Kemudian, akan dibentuk menjadi sebuah agenda untuk mengusung adanya kerjasama dalam menanggulangi masalah peredaran narkoba di kawasan Golden Triangle melalui sebuah *working group*. Oleh karena itu, ASOD yang berperan sebagai wadah bagi anggotanya dapat menyelaraskan serta menghubungkan setiap pandangan ataupun pendekatan untuk membentuk strategi dalam menanggulangi peredaran narkoba tersebut melalui konsolidasi.¹¹

Dalam mewedahi segala pandangan dan solusi dari negara-negara anggota ASOD itu sendiri menghasilkan inovasi yang diusulkan untuk Thailand, Myanmar, dan Laos sebagai inti dari permasalahan peredaran narkoba tersebut dengan membuat *Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development*. Seperti halnya, pemerintahan Myanmar mengatasi adanya peredaran narkoba melalui program *15 Year Narcotics Elimination Plan 1999-2014* yang bertujuan untuk memusnahkan lahan opium, kemudian membentuk undang-undang tentang peredaran narkoba seperti *Opium Dens Suppression Act* tahun 1950 dan *The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Law Section 16* tahun 1993, serta memberikan solusi

¹¹ *Op.cit*

alternatif berupa dana bagi para mantan petani opium untuk melanjutkan kehidupan ke arah yang lebih baik.¹²

Berbeda dengan pemerintah Myanmar, Thailand memiliki cara tersendiri dalam mengaplikasikan upaya yang disarankan oleh ASOD dengan membentuk sebuah program *War on Drugs* di tahun 2015, kemudian membantu para mantan petani opium dengan memberikan sejumlah pekerjaan yang layak dan dapat menggantikan pekerjaan sebelumnya sebagai petani opium, serta membentuk aturan perundang-undangan melalui *ASEAN Training Centre for Narcotics Law Enforcement*, dengan upaya tersebut Thailand berhasil melakukan penangkapan di beberapa daerah perbatasan yang memang menjadi tempat bagi para peredar narkoba. Adapun juga, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Laos diantara lainnya yaitu, menyita dan mengurangi lahan tanaman opium, kemudian membentuk *National Drug Control Programme* dan *The Balanced Approach to Opium Elimination* dengan tujuan agar penggunaan narkoba di Laos dapat berkurang, serta memberikan dana bantuan sebesar US\$ 8 juta untuk membantu pemulihan ekonomi bagi para petani opium yang lahannya telah dimusnahkan.¹³

Akan tetapi, dari upaya-upaya yang terbentuk melalui ASOD dengan mewadahi solusi dan saran kelompok kerjanya tersebut memang membuahkan hasil, tetapi jika dilihat melalui perkembangan peredarannya tersebut upaya-upaya itu pun dinilai tidak cukup efektif untuk membendung peredaran narkoba, karena pada dasarnya narkoba memiliki pasar yang cukup luas dan tidak hanya dilakukan pada satu kawasan saja melainkan sampai ke seluruh dunia. Meskipun, upaya yang dilakukan memiliki kejelasan dan tujuan yang jelas tetapi masih belum maksimal dan memiliki beberapa hambatan yang tidak mendukung penanggulangan peredaran narkoba, hal tersebut diantaranya yaitu seperti lahan opium yang baru lebih

¹² Roza Andriani dan Muhammad Rizki Firzani. "The Role ASOD Mattes In Overcoming Drugs Trafficking in Indonesia, 2020-2025". *JIKA (Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrab)* Vol.1, No.2, Juni Tahun 2023. Hal 65.

¹³ Op.cit

banyak dibandingkan dengan lahan yang disita dan dimusnahkan, adanya kerjasama antara pengedar dan petugas yang menjadi masalah internal, dan juga kemiskinan yang menjadi salah satu penghambat karena menurut peneliti alasan mengapa kemiskinan menjadi salah satu penghambatnya adalah karena ketika seseorang berada dalam keadaan mendesak maka berbagai hal yang seharusnya tidak dapat dilakukan secara terpaksa mereka lakukan untuk kepentingan sendiri.

Oleh karena itu, ASOD harus memiliki cara yang lebih efektif lagi sehingga peredaran narkoba dapat dihentikan dengan baik, tetapi itupun masalah yang cukup sulit dihadapi ASOD karena seperti yang diketahui Golden Triangle itu sendiri disebut sebagai produsen narkoba tertinggi dan dapat dipastikan memiliki partner di luar ataupun dalam negeri yang membantu dalam menyediakan obat-obat terlarang. Untuk mengatasi hal tersebut menurut peneliti ASOD harus memperkuat kebijakan luar negeri dan juga kebijakan mengenai ekspor impor, karena bisa saja dalam suatu barang yang diimpor maupun diekspor terdapat obat-obatan terlarang yang diselundupkan oleh pelaku peredar narkoba tersebut.

Peran ASOD Sebagai Mekanisme Administrasi

Kemudian peran ASOD yang selanjutnya ialah sebagai mekanisme administrasi, dalam hal ini setiap organisasi internasional pasti memiliki sistem yang dibentuk untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Hal ini, berlaku pada ASOD yang menangani kasus peredaran narkoba yang semakin berkembang baik di dalam kawasan tersebut, dengan peredaran narkoba ini keprihatinan dunia internasional semakin buruk karena memakan korban tidak hanya negara maju saja melainkan juga negara-negara yang berkembang, salah satunya di Asia Tenggara ini. Oleh karena itu, ASOD sebagai aktor utama yang dapat memberantas peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* yang terjadi harus memiliki mekanisme administrasi yang bertujuan agar tugas-tugas yang dijalankan bekerja dengan baik dan tersosialisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya ASOD secara garis besar memiliki peran dalam meberantas peredaran narkoba dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupu multilateral. Secara umum, ASOD memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan-kebijakan, strategi yang harus diusungkan, serta pendekatan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Hal tersebut ialah mekanisme administrasi yang direncanakan ASOD secara teratur dan saling bersangkutan satu dengan yang lainnya yang dapat menyelesaikan permasalahan peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle*.

Seperti, kebijakan dibentuk untuk dapat membuat negara-negara anggota dapat mempersatukan pandangan sehingga mampu berkoordinasi lebih efektif, sehingga mampu memperkirakan strategi terbaik, dan juga memberdayakan organisasi-organisasi terkait. Kemudian, ASOD berperan untuk membentuk pendekatan, yang mana pendekatan itu sendiri memiliki tujuan agar negara-negara ASEAN mampu melakukan pendekatan secara keamanan dan kesejahteraan yang seimbang untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi. Terakhir, ialah strategi dimana dalam hal ini ASOD memberikan upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan narkoba dan mempertegas sistem pengawasan yang legal.

Ketiga hal tersebut dibuktikan dengan adanya *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*, kemudian kebijakan mengenai *ASEAN Policy and Strategis on Abuse Control* yang telah disetujui dalam *ASEAN Drugs Experts ke-4* di Jakarta tahun 1984, serta melaksanakan pedoman mengenai bahaya narkoba yang telah ditetapkan oleh "*International Conference on Drugs Abuse and illicit Trafficking*" yang di mana negara anggota ASEAN telah berpartisipasi secara aktif pada pertemuan tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, ASOD dapat dikatakan telah menjadi mekanisme

¹⁴ Hardi Ramadhani. "Kebijakan ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009-2013). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016. Hal 5

¹⁵ Ricky Kurnia Sandi. "*Drug-Free ASEAN 2025 Work Plan: Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Drug Trafficking* (Studi Kasus Kawasan *Golden*

administrasi yang mampu mewujudkan sebuah kebijakan, strategi, maupun pendekatan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Akan tetapi, dengan adanya fakta yang ada bahwa peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* ini pun tidak kunjung reda karena tidak hanya banyaknya lahan baru dari tanaman opium, juga dari bentuk komitmen dan kerjasama setiap negara anggota ASEAN yang kurang. Sehingga, menimbulkan persepsi bahwa ASOD tidak mampu untuk menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba, oleh sebab itu ASOD harus memikirkan cara yang lebih efektif untuk menjaga komitmen dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, karena pada dasarnya komitmen yang dapat dijaga akan memberikan hasil positif bagi pemerintah negara-negara tersebut maupun pada organisasi ASEAN.

Peran ASOD Sebagai Saluran Komunikasi

Dalam konsep peran menurut LeRoy yang terakhir ini ialah ASOD berperan sebagai saluran komunikasi bagi negara-negara anggota ASEAN, dalam perannya sebagai saluran komunikasi ini ASOD memiliki tugas untuk melakukan pertukaran informasi baik melalui suatu kerjasama antar organisasi internasional maupun antar negara. Pada dasarnya permasalahan peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle* ini merupakan masalah yang sama, sehingga memerlukan kebijakan bersama untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, ketika negara anggota ASEAN tidak mampu untuk memberikan solusi bagi kawasannya tersebut, maka diperlukan adanya pihak ketiga dalam suatu kerjasama melalui ASOD yang dapat mengkomunikasikan suatu informasi karena bisa saja pihak ketiga itu sendiri memiliki permasalahan yang sama di negara mereka dan ingin saling bertukar informasi yang memungkinkan memberi solusi terbaik bagi permasalahan peredaran narkoba tersebut. Sebab, permasalahan peredaran narkoba ini tidak hanya menjadi masalah bagi satu kawasan saja melainkan

Triangle Perbatasan Myanmar-Laos-Thailand)". Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional Vol 4, No. 1(2022).

sudah menjadi kejahatan transnasional di seluruh dunia yang dapat merugikan kepentingan sosial negara-negara tersebut.

Pada tahun 2015, ASOD memiliki misi utama dalam memberantas peredaran narkoba di kawasan ASEAN khususnya di *Golden Triangle* yaitu ASEAN bebas dari produksi obat-obatan terlarang jenis opium dimana dalam misi tersebut terdapat beberapa tugas ASOD yakni mencegah budidaya opium, manufaktur, perdagangan, serta penyalahgunaan narkotika itu sendiri.¹⁶ Dalam hal ini, upaya yang dibangun seperti kerjasama ASOD dengan beberapa negara dan juga organisasi internasional yang menangani permasalahan narkoba ini dapat saling berkomunikasi, seperti kerjasama dengan UNODC dapat memberikan informasi mengenai perkembangan peredaran narkoba, jenis narkoba, dan juga berapa jumlah yang diedarkan oleh negara *Golden Triangle* ke seluruh dunia, karena UNODC ini berperan sebagai organisasi internasional yang dapat mengatasi permasalahan narkoba di seluruh dunia. Oleh karena itu, ASOD sebagai organisasi yang mewadahi permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara saja memerlukan bantuan UNODC yang memiliki jangkauan luas di seluruh dunia.

Tidak hanya upaya melalui kerjasama itu saja, ASOD sebagai tokoh utama dalam penanganan permasalahan narkoba tersebut memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bertukar informasi maupun pembuatan strategi dengan membentuk dan mengikuti suatu forum untuk memfasilitasi hal-hal terkait pemberantasan peredaran narkoba di *Golden Triangle*. Seperti pada forum *AIPA Fact Finding Committee* (AIFOCOM) yang memiliki tujuan untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang melalui harmonisasi kerangka hukum mengatasi ancaman narkotika, dan saling mempelajari *best practices* dari negara-negara ASEAN.¹⁷ Kemudian pada forum ASEAN Law Minister Meeting (ALAWMM), dalam forum ini dikatakan bahwasannya negara-negara ASEAN memiliki keprihatinan yang sama dalam menanggapi permasalahan peredaran

¹⁶ Indah Puspita Sari." Peranan ASOD dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand". eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 4, 2018. Hal. 1743.

¹⁷ DPR-RI." AIFOCOM Concerted effort of the ASEAN Inter Parliamentary Association in supporting their governments in achieving Drug-Free ASEAN 2015". Tahun 2012, diakses pada 26 Oktober 2023.

narkoba, forum ini pun memiliki tujuan untuk mengusung semangat dan komitmen bersama sehingga dapat terbentuk kerjasama antar negara di bidang hukum.¹⁸

Tidak hanya itu saja, ASOD didukung oleh forum *ASEAN Airport Interdiction Task Force* (AAITF) di mana forum ini dibentuk untuk megagaskan kerjasama antar negara ASEAN dan bertujuan untuk bekerjasama pada bidang interdiksi khususnya dalam *airport interdiction*, sehingga dengan adanya interdiksi tersebut dapat digunakan untuk memutus jaringan peredaran narkoba yang diedarkan melalui kapal laut, pesawat terbang maupun kendaraan lainnya yang diduga membawa obat-obatan terlarang yang akan diedarkan. Pada forum ini, setiap negara diberikan waktu untuk berdiskusi mengenai upaya yang dilakukan, kemudian mendiskusikan peningkatan kerjasama, serta saling berbagi informasi mengenai pengalaman operasional lapangan.¹⁹

Oleh sebab itu, ASOD sebagai saluran komunikasi untuk negara-negara ASEAN dalam memberantas peredaran narkoba ini dapat dikatakan berpera dengan baik, karena dengan adanya forum-forum yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga adanya kerjasama dengan beberapa organisasi interasional seperti salah satunya UNODC, serta negara-negara yang ikut bekerjasama tersebut dapat menghasilkan sebuah komunikasi yang penting dalam upaya memberantas peredaran narkoba di kawasan *Golden Triangle*. Sebab, pada dasarnya dalam menyelesaikan permasalahan regional maupun internasional membutuhkan beberapa pihak yang ikut andil dalam membentuk suatu upaya yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

¹⁸ M. Ali Zaidan dan Yuliana Yuli W. "Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika". Jurnal Yuridis Vol.2 No.2 Desember 2015. Hal 193

¹⁹ Humas BNN. "ASEAN Bersatu Berantas Narkoba Melalui Kerjasama Interdiksi", 21 Mei 2013 <https://bnn.go.id/asean-bersatu-berantas-narkoba-melalui-kerjasama-interdiksi/> . Diakses 27 Oktober 2023

Melalui penjelasan dalam diatas dapat diketahui ASOD tidak selalu berhasil dalam mengimplementasikan peran-perannya, karena terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi ketika ASOD menjalankan peran tersebut. Jika dilihat menggunakan teori neoliberalisme institusional itu sendiri mengatakan bahwa suatu kerjasama dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, dan memang peran ASOD sebagai sarana kerjasama bagi negara-negara ASEAN itu pun berhasil diimplementasikan.

Peran ASOD sebagai sarana kerjasama, wadah, mekanisme administrasi, serta saluran komunikasi itu sendiri memiliki tujuannya masing-masing. Seperti peran sebagai sarana kerjasama itu sendiri bertujuan untuk membangun relasi yang baik dengan negara-negara anggota, organisasi internasional maupun regional, serta negara-negara yang mendukung untuk memberantas peredaran narkotika di kawasan Golden Triangle. Kemudian, sebagai wadah dengan tujuan agar negara-negara anggota ASEAN dapat mengaspirasikan pendapatnya untuk membentuk upaya bersama dalam memberantas narkoba.

Selanjutnya, perannya sebagai mekanisme administrasi ini pun bertujuan untuk membentuk kebijakan-kebijakan bersama yang dihasilkan dari adanya diskusi antar negara ASEAN yang memungkinkan dapat diimplementasikan dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Terakhir, sebagai saluran komunikasi ini merupakan peran terpenting bagi ASOD karena komunikasi memiliki peran tersendiri bagi negara anggota ASEAN agar tidak terjadi adanya *miss* komunikasi dan juga dapat berbagi informasi satu dengan yang lainnya maupun dengan negara atau organisasi internasional yang bekerjasama.

Akan tetapi, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan upaya pencegahan peredaran narkoba di kawasan Golden Triangle itu sendiri, seperti dalam upaya pemusnahan lahan opium yang tidak sebanding dengan adanya lahan opium yang baru dengan jumlah yang lebih banyak. Tidak hanya mengenai lahan-lahan opium saja yang menjadi hambatan, tetapi juga negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang kurang dalam menjalankan

upaya serta bekerjasama untuk memberantas peredaran narkoba tersebut, sehingga meskipun ASOD memiliki tujuan untuk mendeklarasikan ASEAN *drug free* di tahun 2015 itu pun tidak dapat terealisasi dengan baik karena adanya hambatan tersebut. Oleh karena itu, jika hambatan tersebut masih menjadi permasalahan yang ada dalam pemberantasan peredaran narkoba, maka peran-peran ASOD tidak dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kapasitas ASOD sebagai peran utama dalam memberantas peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Tom Abke “*Negara-negara ASEAN Bekerja Sama Untuk Membasmi Peredaran Narkoba*”. Indo-Pacific Defense Forum. 10 Januari 2019. <https://ipdefenseforum.com/id/2019/01/negara-negara-asean-bekerja-sama-untuk-membasmi-peredaran-narkoba/> . diakses pada 25 April 2022.

A. LeRoy Bannet dan James K. Oliver, *International Organization: Principles and issues*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.

Ayu Ma’rifah, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, “*Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.27 No. 8, (2021) Hal. 1156-1157.

Devi Anggraini, “Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara”, dalam *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016.

DPR-RI.” AIFOCOM Concerted effort of the ASEAN Inter Parliamentary Association in supporting their governments in achieving Drug-Free ASEAN 2015”. Tahun 2012, diakses pada 26 Oktober 2023.

Fredy B. L. tobing. “Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara”, dalam *Jurnal Politik Internasional*, Vol 5 No 1 November 2002 h. 83.

Hardi Ramadhani. "Kebijakan ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) Menanggulangi Drugs Trafficking di Indonesia (2009-2013). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016. Hal 5.

Humas BNN. "ASEAN Bersatu Berantas Narkoba Melalui Kerjasama Interdiksi", 21 Mei 2013 <https://bnn.go.id/asean-bersatu-berantas-narkoba-melalui-kerjasama-interdiksi/> . Diakses 27 Oktober 2023.

Isnaini, N. *Kebijakan Asean Dalam Penanganan Drugs Trafficking Di Kawasan Segitiga Emas (Myanmar, Thailand, Laos) Periode 2013-2016* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).

Juliando Rachman, P.A, "*Implikasi ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam menghadapi perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara*". Skripsi., Universitas Sriwijaya, 2021. Hal. 16.

M. Ali Zaidan dan Yuliana Yuli W. "Peran Indonesia dalam Penanggulangan Narkotika". Jurnal Yuridis Vol.2 No.2 Desember 2015. Hal 193.

May Rudy, Teuku. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2009. 2009.

Rantung, E. F. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Sebagai Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Transnational Organized Crime). *Lex Crimen*, 6(8). 2017.

Ricky Kurnia Sandi. "Drug-Free ASEAN 2025 Work Plan: Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Drug Trafficking (Studi Kasus Kawasan Golden Triangle Perbatasan Myanmar-Laos-Thailand)". *Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional* Vol 4, No. 1(2022).

Roza Andriani dan Muhammad Rizki Firzani. "The Role ASOD Mattes In Overcoming Drugs Trafficking in Indonesia, 2020-2025". *JIKA (Jurnal Ilmu Kesehatan Abdurrah)* Vol.1, No.2, Juni Tahun 2023. Hal 65.

Sari, Indah.P. Peranan ASEAN Senior Official On Drugs Matters (ASOD) Dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand. 6 (4) 1737-1748. 2018.

